

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah global yang berdampak pada lebih dari 700 juta jiwa di dunia, sebagaimana dilaporkan oleh World Bank dalam dokumen *Poverty and Shared Prosperity 2023* (World Bank, 2023). Di tingkat regional Asia Tenggara, kemiskinan masih menjadi isu utama dengan persentase penduduk miskin mencapai 5-10% seperti yang terlihat di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya berdasarkan data World Bank. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah menghapus kemiskinan dalam berbagai macam bentuk di seluruh dunia. Di tingkat nasional, komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu agenda strategis yang menjadi landasan utama arah pembangunan nasional (BPS, 2024).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi seperti keterbatasan akses layanan dasar, kerentanan sosial, dan rendahnya kualitas hidup (Bappenas, 2020). Kemiskinan merupakan realitas sosial yang sulit dihindari dan sulit diberantas. Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya alam tetap tidak terlepas dari persoalan ini, bahkan sejak masa kolonial hingga masa kini (Kabunggul et al., 2025). Kemiskinan juga merupakan sebuah isu yang belum sepenuhnya teratasi, terutama di negara-negara berkembang, yang menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah dan kekhawatiran di berbagai negara (Akbar & Arifin, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa cepat pertumbuhannya, tetapi juga dari

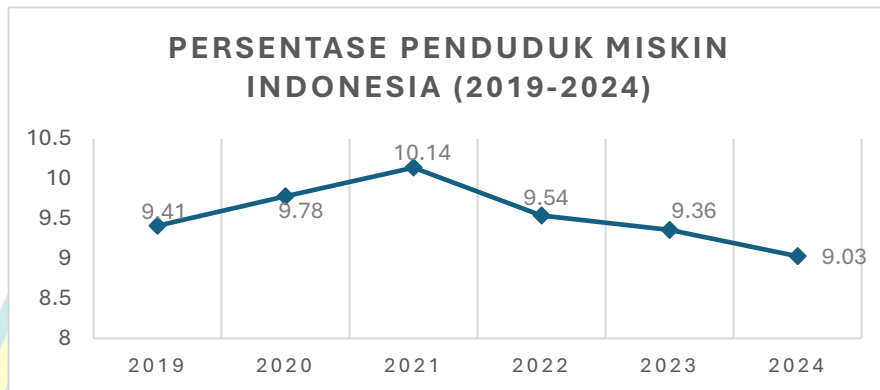
seberapa efektif pertumbuhan itu bisa menurunkan angka kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Isu kemiskinan sudah ada sejak lama, umumnya masyarakat mengalami kemiskinan bukan hanya karena kurangnya makanan, tetapi miskin dalam bentuk kurangnya kemudahan akses atau materi. Saat ini, mereka tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern (Demak et al., 2020). Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan strategi komprehensif dalam penanganannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan segi ekonomi, namun melibatkan juga berbagai faktor lain yang saling berkaitan sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Ajaj et al., 2024).

Salah satu faktor utama kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas antar daerah dan kelompok masyarakat karena distribusi pendapatan yang tidak merata atau adanya ketimpangan pendapatan. Walaupun pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menerapkan berbagai kebijakan fiskal, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan cenderung terbatas jika tidak disertai dengan upaya mengurangi ketimpangan (Agussalim et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan suatu kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi pendapatan yang merata agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut World Bank (2023), sekitar 9,5% hidup penduduk Indonesia masih di bawah garis kemiskinan nasional, yang mencerminkan belum optimalnya distribusi hasil pembangunan. Kondisi ini semakin memburuk ketika pandemi COVID-19 melanda, yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional sebesar -2,07% pada tahun 2020. Dampak kontraksi tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat pengangguran dan menurunnya pendapatan rumah tangga (BPS, 2021).

Akibatnya, jumlah penduduk miskin melonjak sebanyak 1,63 juta orang dalam satu tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa guncangan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kelompok rentan (BPS, 2020). Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional daerah, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2019-2024

Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Berdasarkan gambar 1.1, persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2019–2024 mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin meningkat dari 9,41% pada tahun 2019 menjadi 10,14% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Setelah itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 9,03% pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren menurun, kemiskinan masih menjadi permasalahan penting di Indonesia sehingga diperlukan langkah nyata pemerintah dalam mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.



Gambar 1. 2 Persentase Kemiskinan Provinsi di Indonesia 2024

Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

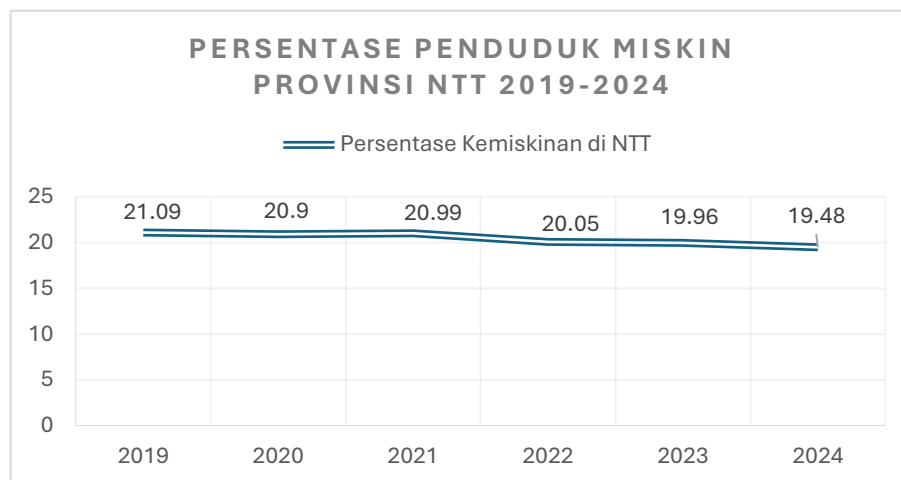
Berdasarkan gambar 1.2, grafik persentase kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2024, terlihat adanya kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi. Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Bali dan DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah. Di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 18%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,03%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di NTT, kemudian karena lengkapnya ketersediaan data di provinsi ini, sehingga provinsi ini dipilih sebagai lokasi penelitian.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kepulauan yang terletak di bagian tenggara Indonesia dan secara administratif terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil, dengan Pulau Timor, Flores, dan Sumba sebagai pulau utamanya. Secara geografis, Provinsi NTT terletak pada wilayah 8°-11° garis lintang selatan dan 118°-125° garis bujur timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di arah barat, Provinsi Maluku di arah timur, serta berbatasan dengan Laut Flores di utara dan Samudra Hindia di selatan. Secara administratif, Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Kupang, yang

bertindak sebagai pusat pemerintahan serta kegiatan perekonomian di tingkat provinsi.

Dari sisi perekonomian daerah, struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh sektor primer dengan produktivitas relatif rendah. Provinsi NTT mencatat bahwa mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki tingkat pendapatan tidak stabil (BPS NTT, 2024). Kondisi tersebut juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini, meskipun pemerintah daerah dan pusat sudah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan pembangunan. Meskipun sektor pertanian memiliki potensi yang melimpah, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain kondisi geografis yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur, serta perubahan iklim. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan (Jandu et al., 2025).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tak pernah absen dari daftar provinsi termiskin di Indonesia, menjadikannya salah satu kantong kemiskinan yang terus mendapat sorotan dalam perencanaan pembangunan nasional. Merujuk pada data BPS NTT (2024), pada tahun 2020 tingkat kemiskinan provinsi ini tercatat sebesar 20,90%, sebuah angka yang mencerminkan masih banyaknya warga yang hidup di bawah standar pemenuhan kebutuhan dasar. Meski dalam beberapa tahun berikutnya terjadi penurunan bertahap hingga menyentuh 19,96% di tahun 2023, laju perbaikannya terbilang sangat lambat dan cenderung stagnan. Yang lebih memprihatinkan, angka ini masih jauh dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 9,36% dalam periode yang sama selisih yang hampir mencapai dua kali lipat. Kondisi tersebut kian dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, yang secara resmi mencatat 14 kabupaten di NTT masih tergolong daerah tertinggal. Keseluruhan fakta ini menjadi bukti nyata bahwa jeratan kemiskinan di Provinsi NTT masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan.



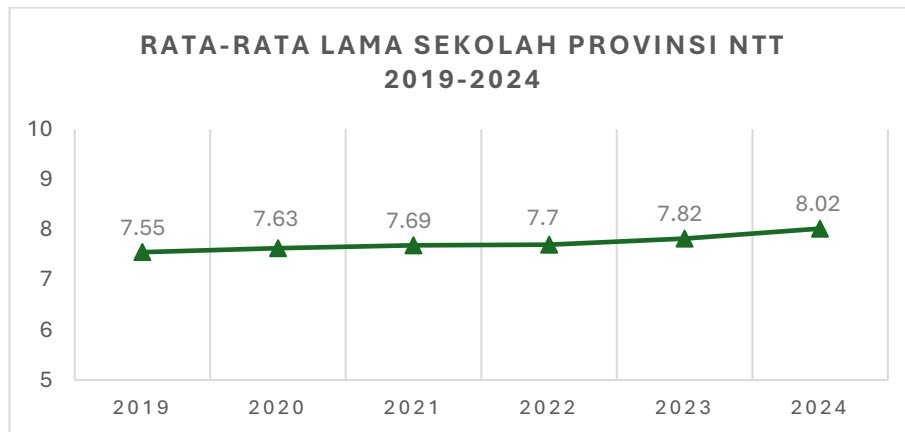
Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT 2019-2024

Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Berdasarkan gambar 1.1, persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Timur periode 2019–2024 menurun dari 20,99% menjadi 19,48%, yang menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan meskipun penurunannya relatif lambat dan cenderung stagnan di seluruh kabupaten dan kota. Namun, disparitas antarwilayah masih tinggi, dengan Sumba Tengah tetap menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi yaitu 30,84% dan Kota Kupang sebagai yang terendah yaitu 8,24%, sehingga menunjukkan penurunan kemiskinan yang belum merata antar kabupaten/kota. Oleh sebab itu, dibutuhkan rencana yang menyeluruh, terintegrasi, dan saling bersinergi dalam mengatasi kemiskinan agar dapat mengatasi isu ini secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kemiskinan adalah suatu siklus yang terus berulang (Demak et al., 2020).

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendidikan kerap dipandang sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terus berulang. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan membuka jalan bagi individu untuk memperbaiki taraf hidupnya sekaligus mendorong kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, pendidikan berperan dalam mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, akses terhadap pendidikan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, di mana kemiskinan menjadi hambatan utama. Hubungan antara

keduanya bersifat timbal balik dan membentuk siklus yang berdampak luas, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk memutus siklus tersebut dan mewujudkan pemerataan pendidikan (Shah & Mushtaq, 2024).



Gambar 1. 4 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTT 2019-2024 (Dalam Tahun)

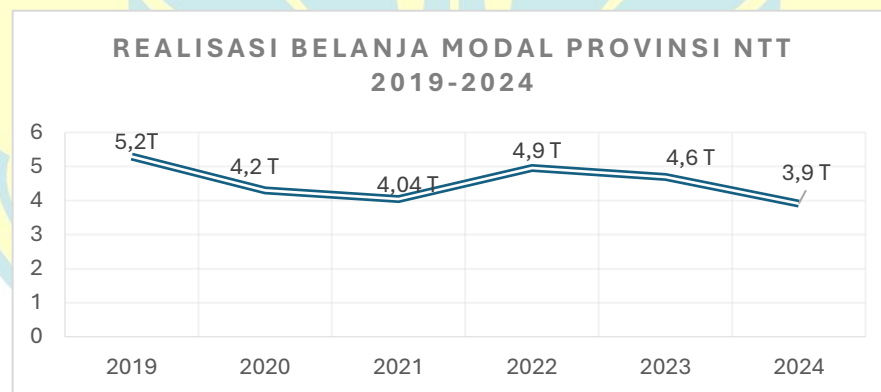
Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Berdasarkan tabel 1.2, data rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan walaupun cenderung lambat, yaitu dari 7,55 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,02 tahun pada tahun 2024. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan signifikan dalam pencapaian pendidikan. Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah terpanjang, yaitu lebih dari 11 tahun, artinya secara umum penduduk di sana telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA. Sementara itu, seperti di kabupaten Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Barat Daya masih berada pada rentang usia 6–7 tahun, yang menggambarkan rata-rata penduduknya hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar atau awal tingkat menengah. Ketimpangan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam kualitas SDM di berbagai wilayah yang berada dalam satu provinsi yang sama.

Meskipun secara teoritis peningkatan pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) seharusnya menurunkan tingkat kemiskinan, namun berbagai penelitian menemukan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Faritz dan Soejoto (2018) menyatakan pendidikan (RLS) berpengaruh negatif terhadap

variabel kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan koefisien regresi yang sama dengan pendekatan *Human Capital* yang menjelaskan bahwa pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga produktivitas, sehingga bisa membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian Pradipta dan Dewi (2020) rata-rata lama sekolah tidak memengaruhi tingkat kemiskinan karena meskipun rata-rata lama sekolah di daerah tersebut cukup tinggi, tetapi tingkat kemiskinan di sana juga masih tinggi.

Selain pendidikan, peran pemerintah daerah sangat penting melalui penerapan kebijakan fiskal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ramli dan Bato (2024) menyatakan alokasi dana transfer fiskal oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam pelaksanaannya, salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan langsung oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Secara teoritis, belanja modal ini dimaksudkan untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



Gambar 1. 5 Realisasi Belanja Modal Provinsi NTT 2019-2024

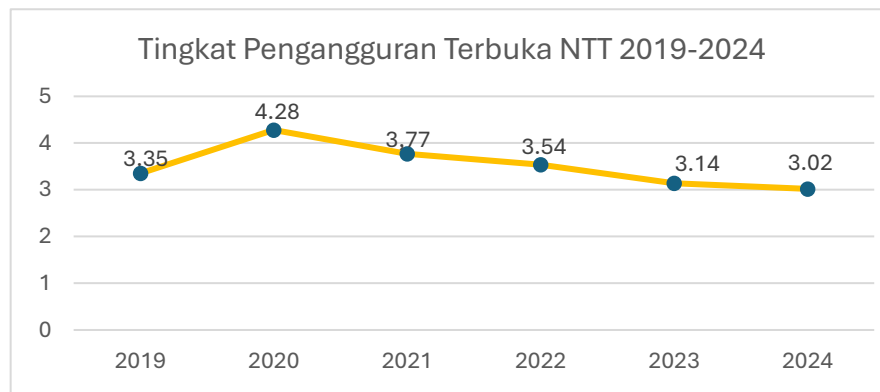
Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Berdasarkan gambar 1.5, realisasi belanja modal di Provinsi NTT dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan arah yang fluktuatif. Pada tahun 2019, belanja modal tercatat sebesar 5,2 triliun lalu mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 4,2 triliun, yang menunjukkan adanya penurunan dalam belanja modal di awal masa pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup besar, mencapai angka 4,9 triliun, yang menunjukkan bahwa belanja modal daerah

kembali mengalami percepatan. Namun, pada tahun 2023 realisasi belanja modal kembali berkurang menjadi 4,6 triliun, dan penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan angka 3,9 triliun.

Meskipun angka belanja modal yang direalisasikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2019 hingga 2024 cukup tinggi, yaitu berkisar antara 3,9 triliun hingga 5,2 triliun, bahkan pada pasca pandemi tahun 2022 belanja modal mencapai angka paling tinggi yaitu 4,9 triliun, namun penurunan persentase tingkat kemiskinan yang terjadi tidak sebanding dengan tingkat pencapaian tersebut. Mustaqimah et al., (2017) dalam penelitiannya menyatakan belanja modal pemerintah berperan penting dalam pengurangan angka kemiskinan, karena dapat meningkatkan kualitas SDM serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Amami dan Asmara (2022) yang tidak menemukan pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 –2020, yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk modal yang besar belum bisa memaksimalkan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, kebanyakan penelitian lebih fokus pada korelasi antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan penelitian yang langsung menguji dampak belanja modal terhadap tingkat kemiskinan masih sangat terbatas. Penelitian Fitasari (2023) misalnya, menekankan peran IPM sebagai faktor perantara, sehingga hubungan langsung antara belanja modal dengan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya terjelaskan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang perlu diisi, yaitu dengan menganalisis lebih lanjut dampak belanja modal terhadap kemiskinan tanpa harus melalui variabel perantara.



Gambar 1. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka NTT 2019-2024

Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Perkembangan pasar tenaga kerja di Provinsi NTT merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Sebuah artikel yang diterbitkan dalam Indonesiana, (2024) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang rendah di NTT tidak selalu mencerminkan standar hidup masyarakat yang sejahtera. Hal ini juga dikonfirmasi oleh data BPS, yang menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka di NTT periode tahun 2020-2024. Bahkan selama pandemi COVID-19, masa di mana tingkat pengangguran umumnya mengalami peningkatan namun tingkat pengangguran di NTT justru tidak naik secara signifikan dan cenderung terkendali.

Namun demikian, kondisi tersebut justru tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Tingkat kemiskinan di NTT masih tergolong tinggi, terlebih pada saat tingkat pengangguran di tahun 2020 dan 2021 atau saat pandemi mengalami penurunan dari 4,28% menjadi 3,77%, justru pada saat yang bersamaan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Sehingga terdapat ketidakselarasan antara indikator pengangguran dengan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rendahnya angka pengangguran tidak selalu menggambarkan kualitas pekerjaan yang baik. Banyak tenaga kerja kemungkinan terserap di sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah dan cenderung kurang stabil. Maka dari itu, muncul pertanyaan penting apakah tingginya tingkat kemiskinan di NTT disebabkan oleh dominasi pekerja informal yang belum mampu memperoleh pendapatan yang layak.

Begitupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) sekitar 59,45% pekerja di Indonesia juga terserap di sektor informal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja berada di sektor yang umumnya mempunyai produktivitas rendah, pendapatan yang tidak tetap, dan minimnya perlindungan sosial. Penelitian oleh Sari dan Fatimah (2025) menyatakan pekerja bebas atau orang yang berusaha sendiri sering kali terserap pada sektor informal yang cenderung berpenghasilan lebih rendah dan cenderung tidak stabil sehingga apabila jumlah pekerja bebas tersebut meningkat, maka kemiskinan juga meningkat.



Gambar 1. 7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja

Sumber: BPS NTT, data diolah penulis (2026)

Berdasarkan grafik di atas, struktur ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020–2024 masih didominasi oleh sektor informal, meningkat dari 2,074 juta menjadi 2,265 juta pekerja, sementara pekerja formal hanya naik dari 651.522 menjadi 758.562. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja di NTT lebih banyak terserap di sektor informal. Adapun kajian empiris yang dilakukan Sibagariang et al., (2022) menyatakan bahwa suatu karakteristik pekerja informal seperti tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadikannya lebih rentan dipengaruhi kemiskinan. Hal ini bertentangan dengan temuan Paramita & D, (2012) penelitian mereka menunjukkan sektor informal memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan kemiskinan. Pada

dasarnya, sektor informal dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pada akhirnya menyebabkan mereka keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, kemiskinan menjadi suatu perhatian penting di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, karena banyak dari wilayah tersebut menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas SDM. Tingkat pendidikan yang cenderung rendah membatasi peluang penduduk untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan mendapatkan penghasilan yang layak. Selain itu, di wilayah-wilayah tersebut, peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui belanja investasi bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanan publik. Selain itu, NTT merupakan salah satu provinsi dengan proporsi pekerja informal yang relatif tinggi, sehingga penduduknya lebih rentan terhadap dampak perubahan ekonomi dan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap.

Selain disebabkan oleh hal-hal tersebut, pandemi COVID-19 menjadi masalah penting dalam studi ini, karena telah menyebabkan berubahnya kondisi ekonomi baik sebelum maupun sesudah wabah tersebut melanda. Pembatasan aktivitas sosial selama pandemi menghambat kegiatan ekonomi, menyebabkan hilangnya pendapatan, meningkatkan angka pengangguran, dan memperparah kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Maka dari itu, pandemi COVID-19 digunakan sebagai variabel dummy untuk menganalisis dampak yang berbeda dari situasi sebelum ataupun sesudah pandemi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di NTT, misalnya pendidikan yang menggunakan indikator rata-rata lama sekolah, belanja modal pemerintah daerah untuk pembangunan, mendominasinya pekerja informal dan dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pendidikan, rasio belanja modal, pekerja informal serta kondisi pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di NTT

pada tahun 2019-2024. Adanya ketidaksesuaian dan inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, serta jumlah penelitian yang masih terbatas di wilayah Kabupaten/Kota NTT, maka daerah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ditemukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh Pekerja Informal Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024?
4. Apakah terdapat pengaruh Pandemi Covid-19 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024.
2. Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024.
3. Pengaruh Pekerja Informal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2019–2024.
4. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat di antaranya. sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur empiris di bidang ekonomi pembangunan tentang pengaruh pendidikan, belanja modal serta pekerja informal terhadap tingkat kemiskinan. Temuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan akademis dalam memahami peran pendidikan, kebijakan pemerintah daerah dan struktur tenaga kerja dalam dinamika kemiskinan, khususnya di provinsi NTT.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti berikutnya serta sebagai rujukan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik terkait, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, belanja modal daerah, pekerja informal, serta kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dan para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama dalam perbaikan pendidikan, pengelolaan belanja modal dan pembuatan lapangan kerja yang produktif, sebagai upaya strategis dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.